BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen

a. Pengertian manajemen

Sebelum membahas mengenai pentingnya pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian manajemen .Dalam hal ini, G. R. terry (Soewarno, 1982 : 16) mengemukakan bahwa :

> Manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, setiap organisasi yang telah dibagi-bagi bidangnya harus melaksanakan fungsi manajemen secara berdayaguna dan berhailguna. Lebih lanjut Terry (Malayu S. P. Hasibuan, 1984 : 3) juga menyatakan :

> Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber-sumber lainnya.

Dari pendapat tersebut diatas dapat dikatakan bahwa manajemen adalah segenap perbuatan menggerakan sekelompok orang dan mengarahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. Menggerakan sekelompok orang berarti mendorong, memimpin, menjuruskan dan menertibkan serta menggiatkan orang-orang agar melakukan

perbuatan-perbuatan yang mengarah pada pencapain tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kerja sama. Sedangkan mengarahkan segala fąsilitas berarti kegiatan menghimpun, memelihara dan mengendalikan alat, benda, uang, ruang waktu dan metode kerja atupun peralatan lainnya yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kerja sama. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu dalam kegiatan manajemen inilah yang biasanya disebut fungsi-fungsi manajemen.

b. Fungsi-fungsi manajemen

Terry (Soewarno, 1982 : 25) menggolongkan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut :

1. Perencanaan (Planning).
2. Pengorganisasian (Organizing).
3. Penggerakan Pelaksanaan (Actuating).
4. Pengawasan (Controlling).

Pada baian lain, Suwarno (1982 : 20-22) juga mengutip pendapat-pendapat para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen, antara lain yaitu :

1. Dalton E. Mc. Farland
   a) Perencanaan (Planning)
   b) Pengorganisasian (Organizing)
   c) Pengawasan (controlling)
2. Wiliam H. Newman
   a) Perencanaan (Planning)

b) Pengorganisasian (Organizing)

c) Pengumpulan Sumber (Assembling Resources)

d) Pengendalian Kerja (Supervising)

e) Pengawasan (Controlling)

3. Koontz & O'Donnel
a) Perencanaan (Planning)
b) Pengorganisasian (Organizing)
c) Penyusunan Pegawai (Staffing)
d) Pembinaan Kerja (Direccting)
e) Pengawasan (Contolling)

Dengan memperhatikan beberapa pendapat mengenai fungsi-fungsi manajemen tersebut, jelaslah bahwa pengawasan (Controlling) adalah merupakan salah satu fungsinya. Suatu organisasi yang tidaka dapat melaksanakan fungsi pengawasan ini sebagaimana mestinya dikhawatirkan organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuan/sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soemito (1984 : 109) yang megemukakan : "Apabila suatu intnsi tidak melaksanakan pengawasan dengan baik , maka akan terjadi penyimpangan–penyimpangan yang berakibat terjadinya kerugian bagi program bahkan tujuan, serta sasaran yang telah ditetapkan tidak akan tercapai."

2.2. Pengawasan

a. Pegertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakan hasil pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan serta kebijaksanaan yang tel;ah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diktakan oleh G. R. Terry (1970 : 2) :

> Pengawasan adalah proses apa yang dinilai, dan jika perlu diambil tindakan korektif agar pelaksanaan sesuai dengan rencana, dengan demikian pengawasan diperlukan untuk menjamin terhadap terjadinya penyimpangan, serta bermaksud mengukur sejauh mana hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dan dapat memperbaiki yang dianggap perlu, dan menganalisa hasil pekerjaan dengan standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan pendapat Terry di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah kegiatan menilai atau mengukur sejauh mana hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan, apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan , dan jika perlu diambil tindakan-tindakan korektif untuk menjamin tercapainya rencana yang telah ditetapkan tersebut.

b. Tujuan Pengawasan

Mengenai tujuan pengawasan, Sondang P. Siagian (1986 : 114) menyatakan bahwa :

> Tujuan utama pengawasan adalah mengusahakan agar semua yang direncanakan dapat menjadi kenyataan, pengawasan pada taraf pertama bertujuan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan, dan mencari serta menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana dan taraf kedua mencari tindakan perbaikan baik sekarang maupun yang akan datang serta menjaga agar jangan terulang lagi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan pengawasan adalah agar semua yang direncanakan dapat tercapai, diantaranya adalah :

1. Pengawasan pada taraf pertama bertujuan supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi-instruksi yang diberikan, dan mencari serta menunjukan kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana;

2. Pengawasan pada taraf kedua adalah mencari tindakan perbaikan baik sekarang maupun yabg akan datang serta menjaga agar jangan terulang lagi.

c. Prinsip-Prinsip Pengawasan

Untuk menjamin tercapainya suatu sistem pengawasan yang efektif, maka seorang pengawas harus memahami prinsip-prinsip pengawasan untuk menunjang keberhasilan tugas yang dibebankan.

Menurut Soewarno Handayaningrat (1984 : 149), prinsip-prinsip pengawasan antara lain :

1. Pengawasasan berorientasi pada tujuan organisasi.
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus.
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (feed back) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

d. Syarat-Syarat Pengawasan yang Efektif

Sesuatu yang perlu diketahui bahwa semua pimpinan menginginkan untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang memadai dan efektif untuk membantu agar apa yang dilakukan sesuai dengan rencana. Menurut H. Koontz &

O' Donnell (1976 : 652-656), dinyatakan bahwa syarat-syarat pengawasan yang efektif adalah:

1. Pengawasan harus dihubungkan dengan rencana.
2. Pengawasan harus dihubungkan dengan individu dan kepribadiannya.
3. Pengawasan harus menunjukan adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
4. Pengawasan harus objektif.
5. Pengawasan harus luwes.
6. Pengawasan harus hemat.
7. Pengawasan harus membawa tindakan perbaikan (corrective action).

2.3. Pengolahan Data

a. Pengertian Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan-kegiatan dengan langkah-langkah sesuai prosedur yang telah ditetapkan, untuk mengubah data yang ada ehingga dari data tersebut akan diperoleh suatu informasi yang berguna bagi para pemakainya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Djoko Karsono (1992) yang menyebutkan bahwa pengolahan data adalah : "Rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi untuk mempelajari tujuan sesuai yang direncanakan dengan menggunakan peralatan elektronik maupun manual."

Sedangkan menurut Harry Waluyo (1989 : 10) : "Sistem Pengolahan Data adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan dan terkoordinasi antara manusia, alat-alat, cara dan lain-lain dalam melaksanakan suatu kegiatan pengolahan data sehingga menjadi informasi yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan."

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengolahan data terdapat 3 unsur yaitu : *masukan* (data input), *proses pengolahan*, dan *keluaran* (output) berupa informasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data tersebut juga terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu :

- Manusia (brainware),
- Alat-aalat, baik berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) sebagai bahasa pemrograman,
- Prosedur serta peraturan-peraturan yang ditetapkan.

Jadi, sistem pengolahan data haruslah berjalan menurut suatu prosedur-prosedur tertentu yang terpola menjadi mekanisme sistem. Pengertian Prosedur menurut Soedjadi (1994 : 84) adalah sebagai berikut:

> Prosedur adalah rangkaian dari suatu tata kerja yang berurut, tahap demi tahap serta jelas menunjukan jalan atau arus (flow) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan berasal, ke mana diteruskan dan kapan atau di mana selesainya dalam rangka penyelesaian sesuatu bidang/tugas. Sedangkan tata kerja itu sendiri adalah cara-cara pelaksanaan kerja yang seefesien mungkin atas sesuatu tugas yang diperoleh dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang, jarak, biaya, dan sebagainya.

Tidak selalu suatu sistem pengolahan data dapat berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dimengerti mengingat betapa sulitnya menciptakan sustu sistem yang sempurna untuk dapat dilaksanakan. Selain itu sering terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari rencana yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar penguasaan manajemen, seperti kesalahan dalam perkiraan dan kesalahan yang dilakukan oleh bawahan. Oleh karena itulah kegiatan pengawasan mutlak diperlukan.

b. Pengawasan dalam Kegiatan Pengolahan Data

Berkaitan dengan pengawasan dalam kegiatan pengolahan data, Burch dan Strater (Moekijat, 1996 : 98) berpendapat bajwa :

Terdapat 3 langkah penting dalam kegiatan pengawasan, yaitu :

1. Mengukur keluaran-keluaran sistem ;
2. Membandingkan keluaran-keluaran ini dengan rencana, dan menentukan penyimpangan –penyimpangan apabila ada ; dan
3. Membettulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak menguntungkan dengan melakukan tindakan pembetulan. Di sini ditekankan bahwa bagi manajemen, untuk melakukan tindakan pembetulan/korektif, dianggap bahwa ia mempunyai kekuasaan untuk mengubah atau mengganti masukan.

c. Unsur-Unsur Pengawasan dalam Kegiatan Pengolahan Data

Unsur-unsur dalam sistem adalah data masukan, proses dan keluaran, yang menunjukan parameter sistem yang beberapa diantaranya dapat diukur dan dinilai. Dalam rangka mengukur keseluruhan keberhasilan sistem dalam mencapai tujuannya, maka hal ini berhubungan dengan parameter keluaran yang menunjukan titik pusat pengawasan. Untuk menggunakan parameter ini sebagai titik pusat pengawasan, maka diadakan unsur-unsur pengawasan. Menurut Burch dan Strater (Moekijat, 1996 : 98), unsur-unsur pengawasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penentuan keluaran standar, yaitu hasil yang diinginkan atau tujuan sistem.
2. Perancangan dan pelaksanaan sustu sensor yang mengumpulkan data yang berhubungan dengan keluaran, mengukur dan menilai hasil keluaran dan menyampaikan informasi yang dihasilkan kepada manajemen.
3. Pengerjaan seorang manajer atau suatu mekanisme yang mengambil tindakan korektif, informasi yang dihasilkan sistem akan menunjukan kebutuhan akan tindakan demikian.

2.4. Kualitas Informasi

Menurut Gordon B. Davis (Onong Uhjana, 1989 : 6) menyatakan bahwa "*information is data that has been processed into a form that is meaningful to recipient and is of real or percevied value in current or prospective decisions.*" (Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang).

Sedangkan menurut Burch dan Strater, (Moekijat, 1996 : 6) "informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan ".

Definisi-definisi di atas menyatakan bahwa informasi adalah merupakan hasil dari suatu kegiatan pengumpulan dan proses pengolahan data yang dilakukan. Data adalah merupakan bentuk yang masih mentah yang belum menggambarkan dengan jelas tentang kesatuan kejadian, sehingga masih perlu mengalami pengolahan untuk dapat menjadi suatu informasi yang berguna. Pengertian data itu sendiri, menurut John J. Longkutoy (Onong Uchjana, 1989 : 66) yaitu :

> Istilah data adalah suatu istilah majemuk. Yang berarti fakta, atau bagian dari fakta yang mengandung arti, yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, yang menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain-lain. Jelasnya data itu dapat berupa apa saja dan dapat di temui di mana saja. Kemudian kegunaan daripada data ialah sebagai bahan dasar yang objektif (relatif) di dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan keputusan oleh pimpinan organisasi.

Menurut George R. Terry, suatu informasi akan berguna atau tidak bergantung pada (Moekijat, 1996 : 7) :

1. Tujuan si penerima. Apabila informasi itu tujuannya untuk memberi bantuan maka informasi itu harus membantu si penerima dalam apa yang diusahakannya untuk memperolehnya.
2. Ketelitian penyampaian dan pengolahan data.
3. Waktu, apakah informasi tersebut masih *up to date* atau tidak.
4. Ruang atau tempat. Apakah informasi itu tersedia dalam ruangan atau tempat yang tepat.
5. Bentuk.
6. Semantik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa suatu informasi dapat berguna sebagai landasan pengambilan keputusan apabila memenuhi kriteria tertentu. Pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi berkualitas akan sangat menunjang bagi kelangsungan organisasi, sebaliknya apabila pengambilan keputusan ternyata di dasarkan atas informasi yang salah, maka dikhawatirkan organisasi tersebut akan menghadapi permasalahan-permasalahan baru.

Berkaitan dengan hal tersebut Jogiyanto H M (1993 : 10) mengungkapkan bahwa :

> "Kualitas dari suatu informasi (quality of information) tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat berarti sistem informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Tepat waktu artinya informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Sedangkan relevan berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya."

2.5. Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel ini dibuat agar terdapat keseragaman dalam pemahaman terhadap pengertian variabel-variabel serta untuk menghindari kesalahan dalam menentukan indikator, instrumen dan data yang akan dikumpulkan. Adapun definisi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Yang di maksud dengan Pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam kegiatan pengolahan data, dalam hal ini yaitu pihak pimpinan yang menduduki jabatan eselon pada unit-unit yag terlibat dalam proses pengolahan data yang terdapat di PPDIA, untuk menjamin agar kegiatan pengolahan data yang dilakukan dapat memperoleh hasil/sasaran yang diharapkan. Tingkat keberhasilan pengawasan ini ditentukan oleh faktor-faktor :
   - *Kemampuan serta pengetahuan terhadap sasaran dan prosedur*, di mana apabila pelaksana serta pihak manajemen sama-sama mengetahui sasaran yang hendak dicapai serta cara mencapai sasaran tersebut, diharapkan kegiatan yang dilaksanakan akan tepat sasaran, yaitu memperoleh informasi yang akurat.
   - *Usaha agar pelaksanaan sesuai dengan rencana*, yaitu apabila pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, termasuk pemenuhan terhadap jadwal peenyelesaian yang telah ditetapkan, maka tercapainya sasaran diharapkan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan
   - *Tindakan korektif*, yaitu menjamin adanya suatu koreksi atas kesalahan-kesalahan serta reaksi atas umpan balik yang diperoleh dari pengguna informasi, sehingga penyempurnaan dapat dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna.
2. Yang dimaksud dengan Kualitas Informasi adalah laporan-laporan yang dihasilkan dari pengolahan data yang dilakukan , merupakan informasi akurat,

tepat waktu dan relevan, yang diperlukan oleh pengguna laporan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan APBN.